

PENERAPAN MODEL TINDAKAN KOLEKTIF SEBAGAI UPAYA MENGATASI KEMISKINAN DISEKTOR PERTANIAN

Riska Wulandari Sitorus

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps.V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

wulandaripanche@gmail.com

Received: 28 Juni 2022; Accepted 22 Agustus 2022; Published 1 September 2022

Ed 2022; 3 (2): 143-149

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan yang dialami oleh petani dan mencoba menawarkan alternatif pemecahan masalah yang bertumpu pada usaha pengembangan sumberdaya petani. Indonesia merupakan negara besar dengan sumberdaya pertanian yang melimpah. Hal ini menjadi modal besar bagi sebuah pembangunan untuk mencapai kemakmuran. Namun tingginya jumlah penduduk dan melimpahnya sumberdaya alam ini tidak dibarengi dengan keterampilan masyarakat khususnya kalangan petani. Banyak kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi masalah ini, namun kebijakan itu kurang populer serta sulit untuk diterima dan diterapkan di masyarakat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Pada tahun 2007, Pemerintah telah berhasil membuat program pembangunan pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai sektor lain terkait dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Departemen Pertanian.

Kata kunci: Kemiskinan, Ekonomi, Pertanian

IMPLEMENTATION OF THE COLLECTIVE ACTION MODEL AS AN EFFORT TO OVERCOME POVERTY IN THE AGRICULTURAL SECTOR

ABSTRACT

This study aims to reveal the problems experienced by farmers and try to offer problem-solving alternatives that rely on farmers' resource development efforts. Indonesia is a large country with abundant population and agricultural resources. This became a huge capital for a development to achieve prosperity. However, the high population and abundance of natural resources are not accompanied by the skills of the community, especially among farmers. So far many policies have been taken by the government in addressing this problem, but the policy is less popular and difficult to accept and implement in society. The method used in this study is a qualitative method. By 2007, the government had successfully established a government development program. The successful implementation of agricultural development is independent of the support of various other related sectors and the efforts made by the Ministry of Agriculture.

Keywords: Poverty, Economy, Agriculture

PENDAHULUAN

Pertanian masih merupakan sektor yang penting, sebab sektor ini menjadi tumpuan penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja sebanyak 104,485,444 orang, 41,53 persen bekerja di sektor pertanian (Badan Pusat Statistik, Februari 2010). Sektor pertanian merupakan penyedia pangan yang penting dalam menjaga stabilitas negara. Kontribusinya dalam menyumbang devisa dan dukungannya terhadap sektor industri tidak boleh diabaikan. Kenyataan yang harus diakui bahwa sektor pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan unit usaha yang relatif sempit. Keadaan pelaku usaha pertanian tersebut setiap tahun semakin bertambah jumlahnya dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Masih rendahnya taraf kesejahteraan petani terlihat dari hasil sementara Sensus Pertanian (SP) 2003 yang dibandingkan dengan SP 1993. Rumah tangga petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektar, baik milik sendiri maupun menyewa, pada tahun 1993 hanya 51,9 persen dari 20,8 juta rumah tangga petani saat itu. Tahun 2003, atau 10 tahun kemudian, porsi petani gurem 53,9 persen dari total rumah tangga petani. Tahun 2008, persentase petani gurem diproyeksikan 55,1 persen (<http://els.bappenas.go.id/>). Kenaikan persentase rumah tangga petani gurem terhadap rumah tangga pertanian pengguna lahan mengindikasikan semakin miskinnya petani di Indonesia.

Pembangunan sektor pertanian sudah selayaknya tidak hanya berorientasi pada produksi atau terpenuhinya kebutuhan pangan secara nasional, tetapi juga harus mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat petani. Pembangunan pertanian merupakan bagian yang terintegral dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Pembangunan yang dilakukan sudah semestinya mengandung nilai-nilai: (a) Tercapainya *swasembada*, dalam arti kemampuan masyarakat untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup: pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar, dan keamanan; (b) Peningkatan *harga diri*, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk dapat hidup mandiri terlepas dari penindasan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka; dan (c) Diperolehnya *kebebasan*, dalam arti kemampuan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan secara terus menerus bagi setiap individu maupun seluruh warga masyarakatnya.

Dalam menghadapi tantangan perekonomian pasar serta menyongsong era globalisasi, keberhasilan proses pembangunan pertanian tergantung pada penguasaan teknologi pertanian oleh petani dan kemampuan bersaing dari para petani suatu negara. Kondisi ini akan sulit mengingat kebanyakan pelaku usaha pertanian di Indonesia adalah petani-petani kecil. Di sisi

lain, petani hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk memanfaatkan waktu luang bagi usaha di luar pertanian (*on-farm* atau *off-farm*). Usaha petani tidak cukup besar untuk merespons kelebihan tenaga kerja.

Pembangunan bukan semata-mata fenomena ekonomi, tetapi pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan soal pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Jadi selain peningkatan pendapatan dan *output*, juga berurusan dengan perubahan mendasar tentang kelembagaan, sosial dan struktur administrasi serta sikap masyarakat, kebiasaan dan kepercayaan. Menurut rumusan hasil Konpernas XII PERHEPI, pengelolaan sumberdaya pertanian di Indonesia dihadapkan pada permasalahan struktural dan permasalahan kultural. Permasalahan struktural menyangkut faktor-faktor eksternal yang kurang mendukung, seperti: rendahnya teknologi yang diterapkan, terbatasnya akses modal, kelembagaan dan manajemen, kurangnya dukungan pemasaran, dan kelembagaan yang tidak mendukung. Permasalahan kultural ditandai oleh ciri masyarakat Indonesia, tingkat *karsanya* relatif rendah terutama diperani oleh 'budaya lunak' yang dicirikan: tidak adanya orientasi ke depan, tidak adanya keyakinan terhadap hari esok yang lebih baik, cepat menyerah, *refreatism* (lebih berorientasi pada akherat), dan lamban.

Program-program pembangunan pertanian selama ini belum berpihak kepada petani kecil yang jumlahnya sangat banyak. Selain penguasaan lahan yang sempit, keterbatasan akses pada faktor produksi yang lain menjadi sebab keterpurukan petani. Situasi ekonomi yang ada, dengan ekonomi pasar dan kebijakan pertanian yang tidak berpihak ke petani semakin mendorong petani ke arah marginalisasi secara ekonomi dan sosial. Kondisi ini semakin parah karena sumberdaya manusia petani belum mampu mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, selain pengaruh nilai-nilai budaya yang menyebabkan petani semakin terjebak dalam dalam kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode kualitatif yang berfokus tentang perekonomian masyarakat khususnya petani dengan tujuan untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonomi serta memberikan solusi untuk para petani dalam menghadapi permasalahan ekonomi. Metode penelitian dilakukan dengan cara yang efektif sehingga mendapatkan hasil yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan atas apa yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Kekinian

Sumatera Utara termasuk salah satu daerah potensial dalam sektor pertanian. Hal itu bisa dilihat dari tingginya produksi sejumlah produk pertanian. Perekonomian Sumatera Utara (Sumut) masih menikmati kontribusi (sumbangan) besar dari sektor pertanian. Hal tersebut terlihat dari data pertumbuhan ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut. Pada triwulan I-2016, Sumut mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,02%. Dari capaian tersebut, pertanian menyumbang 1,43%. Sumbangan sektor pertanian tercatat melampaui sektor industri pengolahan yang berkontribusi 1,22%, konstruksi sebesar 0,52% dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor menyumbang 0,43%.

Data BPS juga mencatat, struktur perekonomian Sumut masih didominasi tiga lapangan usaha utama yakni pertanian sebesar 22,89%, industri pengolahan 19,28%, perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 17,71%. Produksi padi di Sumatera Utara sepanjang 2017 mencapai angka 5,1 juta ton atau surplus 1,7 juta ton dari kebutuhan yang diperhitungkan sebesar 3,4 juta ton. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Azhar Harahap mengatakan, produksi padi di seluruh daerah selama 2017 meningkat sekitar 0,5 ton dari tahun sebelumnya. Pada 2016, produksi padi hanya 4,6 juta ton. Secara umum kondisi kemiskinan di Indonesia terutama di pedesaan dapat disebabkan oleh faktor-faktor keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, pendidikan yang rendah, kekurangmampuan dalam hal teknis dan manajemen, keterbatasan akses pada sumber modal, ketimpangan distribusi lahan, ketimpangan gender dan bencana alam. Hal itu berakibat penduduk desa berpendapatan rendah, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, suara dan aspirasi yang kurang didengar, keberadaan yang kurang diperhatikan dan terpinggirkan dari komunikasi global.

Ada faktor yang menyebabkan program pengentasan kemiskinan di Indonesia mengalami kendala dan bahkan dinilai gagal pada saat ini. Sebagian besar program pengentasan kemiskinan cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin (raskin) dan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan. Program-program bantuan yang berorientasi

pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin.

Solusi yang Pernah Ditawarkan

Pada tahun 2007, pemerintah telah berhasil membuat program pembangunan pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai sektor lain terkait dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Departemen Pertanian. Berbagai kegiatan strategis yang dilaksanakan Departemen Pertanian, merupakan kegiatan yang spektakuler untuk mendongkrak pertumbuhan sektor pertanian utamanya indikator makro. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah: a) Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), b) Pengembangan Kawasan dan Sentra Hortikultura, c) Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan, d) Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Tebu, f) Fasilitasi Pengembangan Jarak Pagar, g) Akselerasi Pengembangan Kapas, h) Pemberdayaan Usaha Kelompok, i) Restrukturisasi Perunggasan, j) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui PMUK, k) Gerakan Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Gabah/Beras (GP4GB), l) Fasilitasi Alat Pasca Penen, m) Pengelolaan Infrastruktur Pertanian, n) Program Aksi Desa Mandiri Pangan, o) Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM – LUEP), p) Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, q) Penyusunan Kalender Tanam Dalam Mengantisipasi Perubahan Iklim Global, r) Pengentasan Kemiskinan melalui Kegiatan Program Peningkatan Pendapatan Petani melalui Inovasi, s) Program Rintisan dan Akselerasi Pemasaryakatan Teknologi Inovasi (Prima Tani), t) Pengembangan Energi Alternatif, u) Bantuan Untuk LM3, v) Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), w) Pelaksanaan Kegiatan Penunjang, x) Pengawasan Lalulintas Komoditas Pertanian dan y) Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian (<http://www.deptan.go.id>).

Program-program pembangunan pertanian dalam mengatasi masalah kemiskinan memiliki banyak manfaat bagi petani yang secara umum hidup sangat tidak sejahtera. Di tahun 2007, Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) merupakan program strategis sebagai upaya terobosan guna memacu peningkatan produksi padi (beras) nasional dalam rangka memantapkan ketahananpangan dan mengisi peluang pasar ekspor. Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK (Penguatan Modal Usaha Kelompok) ditujukan untuk membantu petani melalui Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani untuk mengembangkan usaha taninya serta meningkatkan produktivitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui pemanfaatan dari

kelompok PMUK. Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dilakukan pada desa lama antara lain: seleksi lokasi sasaran, sosialisasi program, pendampingan, penyusunan data dasar desa, pelatihan, pemberdayaan kelompok afinitas, penyusunan rencana pembangunan desa mapan partisipatif. Dalam mendukung pelaksanaan Program P2BN dicanangkan Gerakan Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Gabah/ Beras (GP4GB) di tujuh propinsi dan tiga belas kabupaten. Gerakan ini merupakan gerakan terpadu yang melibatkan, Perum Bulog, BRI dan Bukopin serta Asosiasi Petani.

Upaya pemberdayaan lain bagi para petani dapat dilihat dari program P4K (Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil) oleh Departemen Pertanian. P4K bertujuan membangun sistem partisipatif dan berkelanjutan untuk membantu penduduk miskin memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan keluarganya, melalui pencapaian kemandirian dan mengantarkan mereka keluar dari kemiskinan dengan kekuatan mereka sendiri. Sistem partisipatif dan berkelanjutan tersebut berwujud kelompok-kelompok swadaya.

Langkah-langkah Strategis

Model pemberdayaan petani melalui penyatuan fisik lahan milik keluarga petani atau kelompok petani yang kemudian dikelola secara bisnis agar terpenuhi skala ekonomi. Rekayasa sosial dilakukan dengan mengetahui secara empiris dan studi kasus mengenai kondisi pertanian pedesaan. Rekayasa ekonomi dilakukan dengan pengembangan akses permodalan untuk pengadaan saprodi dan akses pasar. Rekayasa teknologi dapat dilakukan dengan pencapaian teknologi yang biasa digunakan petani. Terakhir, rekayasa nilai tambah dilakukan melalui pengembangan usaha *off-farm* dari produk primer menjadi produk sekunder. Ketiga rekayasa tersebut harus dikoordinasi secara vertikal dan horizontal sehingga akan melibatkan banyak pihak yang diwadahi dalam satu kemitraan.

Pihak yang dilibatkan dalam adalah petani, swasta, pemerintah dan mahasiswa. Petani akan bertindak sebagai anggota sekaligus pengelola. Sekelompok petani yang sudah dibentuk dari beberapa kepala keluarga harus secara aktif mengelola perencanaan *on-farm* (produk primer) dan *off-farm* (produk sekunder) dengan aset-aset seperti lahan pertanian dan teknologi yang digunakan. Peran swasta di sini karena fungsinya sebagai investor atau penanam modal dikarenakan investor memiliki minat terhadap Tindakan Kolektif tersebut karena pengelolaannya tidak hanya menghasilkan produk primer saja tapi juga produk sekunder yang memiliki nilai tambah. Pihak swasta akan menyediakan berbagai sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk dan obat-obatan untuk berusahatani. Selain itu, pihak swasta juga juga

bertanggung jawab sebagai penampung produksi (badan penyanggah produk pertanian sekunder) dan mitra pemasaran. Sementara pemerintah bertindak sebagai fasilitator sekaligus katalisator dalam kegiatan perencanaan, penyusunan strategi usaha, introduksi teknologi terapan spesifik lokasi yang efisien, pengadaan modal, saprodi serta fasilitator dalam proses pemasaran hasil. Di sini, peran mahasiswa melalui institusi perguruan tinggi melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilibatkan sebagai tenaga penyuluh pertanian pedesaan, terutama meningkatkan pendidikan bidang ilmu pertanian berupa bagaimana cara untuk mengelola lahan pertanian yang baik serta teknologi yang akan digunakan, pendidikan mengenai strategi pemasaran secara sederhana, lebih mengenalkan kepada mereka bagaimana cara mengelola produk pertanian (produk primer) menjadi suatu barang (produk sekunder) yang memiliki nilai tambah serta sebagai pihak yang menghubungkan antara petani dengan swasta dan pemerintah

SIMPULAN

Penyebab utama kurangnya kesejahteraan petani di Indonesia adalah minimnya pengetahuan yang membuat masalah-masalah ini dan banyaknya para petani yang tidak mengetahui cara untuk menjaga kualitas produk yang baik untuk diperjualkan. Di Indonesia sendiri IPTEK masih kurang banyak difungsikan. Teknologi pertanian masih sangat kurang. Petani bahkan masih menggunakan teknologi kuno yaitu tangan dalam menanam dan memanen hasil pertanian seperti padi. Ini tentunya akan menghambat kemajuan pertanian kita. Untuk itu ada beberapa strategi untuk terus mempertahankan pertumbuhan positif di sektor pertanian sebagai berikut: Meningkatkan produktivitas. Tanaman pangan sebagai kebutuhan utama masyarakat harus terus ditingkatkan produktivitasnya. Diversifikasi pangan lokal. Penguatan cadangan logistik. Modernisasi pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.deptan.go.id/> [19 Maret 2010]

Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian Edisi III*. Jakarta: LP3ES.

Nuhung, Iskandar Andi. 2006. *Bedah Terapi: Pertanian Nasional*. Jakarta: PTBhuana Ilmu Populer.